

Nomor Surat	SB-019/FM-CSL/RUPS/IV/2018
Nama Emiten	First Media Tbk
Kode Emiten	KBLV
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Hasil RUPS yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT First Media Tbk	Investor Daily	24 Apr 2018

Nama Pengirim	Shinta M. Paruntu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	24 April 2018 15:31:52
Lampiran	20180424 FM - SB_019 - Penyampaian Iklan Koran Hasil RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Kepada Yth
PT Bursa Efek Indonesia
UP : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT First Media Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT First Media Tbk yang dimuat di Surat Kabar harian **Investor Daily** edisi **Selasa, 24 April 2018** kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Bursa Efek Indonesia masing-masing 1 (satu) eksemplar asli.

Demikianlah penyampaian hasil ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT First Media Tbk
atas nama Direksi



Shinta M. Paluntu
Corporate Secretary

Tembusan :

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Permintaan

daerah penghasil. Selain itu, doa berharap Kementerian BUMN menunjuk direksi Pertamina yang memang punya kemampuan konsep inovasi baru dalam menahan tekanan harga minyak dunia yang tinggi dan kurs rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS. Figur Syamsu Alam, Ahmad Bambang, dan Gihg Prakoso adalah figur yang tepat.

Berpotensi Dipangkas

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko Pertamina Gihg Prakoso mengatakan, anggaran investasi perseroan sebesar US\$ 5,39 miliar pada tahun ini berpaling untuk dipangkas. "Rencana investasi akan disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan," kata dia dalam pesan pendeknya kepada *Investor Daily*.

Gihg pernah menjabarkan, belanja modal tahun ini US\$ 5,59 miliar, sebagian besar masih dialokasikan untuk sektor hulu, yakni mencapai 59% atau setara dengan US\$ 3,29 miliar. Selanjutnya, sebesar US\$ 1 miliar akan digunakan untuk mendanai proyek kilang. Tepatnya, sebesar US\$ 838 juta dikucurkan untuk pengerjaan megaprojek pengolahan dan petrokimia, sementara US\$ 167 juta untuk sektor pengolahan.

Perseroan juga menganggarkan US\$ 838 juta untuk menggarap sektor pemasaran. Sisanya, Pertamina menganggarkan dana investasi sebesar US\$ 279 juta untuk pengembangan bisnis gas. Kemudian, anggaran untuk riset dan lain-lain sebesar US\$ 167 juta atau naik 38,17% dari realisasi tahun lalu US\$ 120 juta.

Selain merasionalisasi anggaran investasi, pihaknya juga membuka pengadaan dan lainnya. Walaupun, dampak dari efisiensi ini tidak akan terlalu signifikan (hasil efisiensi). Tetapi kalau ada peluang efisiensi, kami laksanakan," kata dia.

Pertamina telah menggandeng sejumlah perusahaan dalam menggarap proyeknya. Dalam menggarap proyek kilang, Pertamina telah menggandeng Rosneft Oil Company untuk pembangunan Kilang Tuban. Perseroan juga bekerja sama dengan Saudi Aramco untuk menggarap proyek perbaikan dan peningkatan kapasitas Kilang Cilacap. Belum lama ini, Pertamina menggandeng Overseas Oil and Gas LLC (OOG) dan Cosmo Oil International Pte Ltd (COD) untuk membangun Kilang Bontang.

Di sektor pengolahan dan petrokimia, perseroan mengerjakan banyak proyek. Pertamina kini tengah menggarap Refinery Development Masterplan Program (RDMP) empat kilang, pembangunan dua kilang baru, dan Program Langit Biru Kilang Cilacap. Selain itu, perseroan juga akan mengerjakan proyek peningkatan fleksibilitas minyak mentah kilang dan pengembangan produk turunan. Perseroan menargetkan kapasitas kilang bisa naik menjadi 2 juta barel per hari pada 2025.

Di sektor hulu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengungkapkan, pihaknya membuka peluang untuk perusahaan migas lain bergabung dengan perseroan dalam mengerjakan delapan blok migas terminasi. Bahkan di Iran, Pertamina akan mengajak perusahaan migas internasional untuk menggarap Blok Mansouri yang segera diperoleh hak pengelolaannya.

Kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah menahan harga BBM hingga akhir 2019, Gihg pernah menuntukan, pihaknya akan melakukan efisiensi dari pengadaan dan lainnya. Walaupun, dampak dari efisiensi ini tidak akan terlalu signifikan (hasil efisiensi). Tetapi kalau ada peluang efisiensi, kami laksanakan," kata dia.

Umumkan Panas Bumi

penawaran wilayah panas bumi Cudabad, hingga 13 April lalu, belum ada peserta yang mengembalikan dokumen permohonan untuk WPSPE. "Panitia akan melakukan evaluasi sebelum Cudabad ditawarkan kembali ke Badan Usaha," tutur dia.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, penetapan perusahaan pelaksana PSPE akan dilakukan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pihaknya akan memberikan daftar dua peserta penawaran yang terbaik. "Setelah Pak Menteri tanda tangan, akan kami umumkan (penanganannya)," ujar dia.

Ini kali pertama pemerintah mengelar penawaran wilayah panas bumi dengan skema WPSPE. Dalam dokumen penawaran disebutkan PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh menteri untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi. Kegiatannya yakni mencakup survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu, penerangan sumur eksplorasi, serta perhitungan cadangan panas bumi. Satu wilayah terbuka panas bumi hanya dapat dilaksanakan PSPE oleh satu badan usaha

dan didanai oleh badan usaha tanpa diberikan penggantian.


Jika badan usaha diberi penugasan PSPE ini, maka wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) paling lambat 20 hari sejak penetapan. Selanjutnya, badan usaha melaksanakan kegiatan sesuai RKAB dan melaporkannya. Badan usaha juga wajib menggeber sumur eksplorasi. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi pemotongan sebesar 5% dari komitmen eksplorasi.

"Badan usaha wajib melakukan paling sedikit satu pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan PSPE," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

PSPE dilaksanakan paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing selama satu tahun. Selanjutnya, Perjanjian Awal Transaksi (*Pre Transaction Agreement/PTA*) dengan PT PLN (Persero) akan dilakukan setelah eksplorasi selesai dan Izin Panas Bumi diterbitkan. Acuan harga listrik dalam PTA dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (ayu)

kami mengawal, memastikan masyarakat dapat menyampaikan langsung pengaduannya melalui kantor Desa maupun kantor Kelurahan setempat. Uji

waju membantu warga masyarakat dalam pengisian formulir pengaduan yang telah disediakan di masing-masing kantor desa dan kelurahan. (rap)


be the first

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT") PT First Media Tbk

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan perubahannya (selanjutnya disebut "POJK 32/2014"), Direksi PT First Media Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

- I. Hari/Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat
Hari dan Tanggal : Jumat, 20 April 2018
Waktu : 14.00 s.d 15.05
Tempat : Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapantean 44-48, Jakarta 10110
- II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Bapak Tegeh Pudjowiro - Komisaris Independen
Bapak Harisnda Noerlin - Presiden Direktur (Independen)
Bapak H.R. Soeparnadi - Direktur Independen
Bapak H. RM. Harsono Hadiprojo - Direktur
Bapak Johannes Tong - Direktur
- III. Mata Acara Rapat
1. Peninjauan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sejumlah 1.698.273.748 saham yang mewakili 97,48% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu 1.742.167.807 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.
- V. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasaanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan setiap mata acara Rapat yang dibicarakan. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikemukakan secara sah dalam Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikemukakan secara sah dalam Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai pertanggungjawaban Direksi kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
b. Menetapkan neraca labarugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 1.698.273.748 saham (100%)
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2017.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 1.698.273.748 saham (100%)
3. a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menyetujui delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan pada butir (a) di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 1.698.273.748 saham (100%)
4. a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Paternus Mingkor dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan;
b. Menenerima pengunduran diri Bapak Surjadi Soedirdja dari jabatannya selaku Presiden Komisaris (Independen), disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan;
c. Menetapkan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
• Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Drs. H.R. Soeparnadi
• Komisaris Independen : Bapak Tegeh Pudjowiro
• Komisaris : Bapak Ali Chendra
Direksi:
• Presiden Direktur (Independen) : Bapak Ir. Harlanda Noerlin
• Direktur Independen : Bapak H. RM. Harsono Hadiprojo
• Direktur : Bapak Johannes Tong
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pernyataan keputusan pengesahan dan penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris terasend, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan agar dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikucualkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
e. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 1.698.273.748 saham (100%)

Jakarta, 24 April 2018
PT First Media Tbk
Direksi